



Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Andi Antono¹, Mahmud Setiahad², Ngalimun³

¹²³*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R Boenyamin No. 993 Purwokerto 53122*

Abstract

Village funds which have become a pendulum for village development provide quite a formidable task for village administrators to make the best use of them. The involvement of public and community actors at the local level is a strategic step in managing village funds to provide a transparent and accountable effect, as mandated by the collaborative governance model so that the results of development become more beneficial for the citizens. This research uses a qualitative method. The technique of taking informants is done by snowball sampling while maintaining independence in expressing opinions. Data collection methods with in-depth interviews, observation and document analysis. Data analysis was carried out interactively, starting from data collection, data condensation, data appearance, and research conclusions drawn and combined with the appearance of descriptive data. The results showed that the collaborative process had proceeded well as seen from face-to-face dialogue, building trust, community commitment and various understandings of the development had an impact on effective development outcomes both physical and non-physical in nature.

Keywords: *collaborative governance, village funds, rural development*

Abstrak

Dana desa yang menjadi pendulum pembangunan desa memberikan tugas yang cukup berat bagi perangkat desa untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pelibatan aktor masyarakat dan masyarakat di tingkat lokal merupakan langkah strategis dalam pengelolaan dana desa agar memberikan efek yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh model tata kelola kolaboratif agar hasil pembangunan menjadi lebih bermanfaat bagi warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan snowball sampling dengan tetap menjaga kemandirian dalam menyampaikan pendapat. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif, dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan kesimpulan penelitian yang ditarik dan dipadukan dengan tampilan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif telah berjalan dengan baik, terlihat dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman tentang pembangunan berdampak pada hasil pembangunan yang efektif baik fisik maupun non fisik.

Kata kunci: *collaborative governance, dana desa, pembangunan desa*

^{*}Penulis Korespondensi
E-mail : andiantono611@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan kegiatan pembangunan yang terjadi pada masyarakat desa yang dipicu oleh keinginan untuk maju dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus menerus disertai dengan pemerataan sehingga dalam jangka panjang akan terjadi efek simultan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat dan tabungan masyarakat desa setempat menuju pada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam masyarakat hendaknya ditekankan terus menerus untuk melahirkan kemandirian dan otonomi warganya, sebagaimana dituangkannya undang-undang desa.

Menurut Soleh (2014), terdapat 4 prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam pembangunan pemberdayaan hendaknya dijalankan secara terarah dan ditunjukan secara langsung kepada yang memerlukan, program sengaja dirancang untuk memecahkan masalah, sesuai dengan kebutuhannya, dan aktor utama penyusunan, pelaksanaan program/proyek adalah masyarakat sendiri dan penggunaan pendekatan kelompok, karena secara individual, masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan yang berdimensi pada pemberdayaan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dan aktor kelembagaan di desa untuk saling berdiskusi dalam menentukan skala prioritas dan strategi pembangunan yang akan berjalan, sementara warga desa tidak lagi dipusingkan dengan ketersediaan dana karena berdasarkan amanat Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 pemerintah wajib menggelontorkan dana kepada desa setiap tahunnya. *Colaborative governance* adalah jawaban dalam proses pembangunan

termasuk pembangunan di desa karena memiliki misi transparan dan melibatkan banyak pihak. Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensi dan deleberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplemtasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset (Ansell and Gash, 2007).

Sebagaimana dikatakan oleh Ansell and Gash, (2007) *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non pemerintah* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deleberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Lebih tegas dikatakan oleh Emerson dkk (2012) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan proses dan struktur pembuatan kebijakan publik dan manajemen yang mengajak personal di luar lembaga publik, tingkat pemerintahan dan atau masyarakat, swasta, dan sipil dalam rangka mencapai tujuan publik. Model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash memiliki 4 variabel, yaitu (1) *starting condition* (kondisi awal), (2) institusional (desain kelembagaan), (3) *facilitative leadership* (kepemimpinan yang fasilitative) dan (4) *collaborative prosses* (proses kolaborasi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Karangnanas dan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten

Banyumas, adapun sasaran penelitian adalah perangkat desa dan pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat kedua desa tersebut. Teknik pengambilan informan dilakukan secara *snowball sampling* dengan tetap menjaga independensi dalam mengutarakan pendapat. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, pengamatan dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan penelitian (Miles dkk, 2013) dan dikombinasikan dengan penampilan data deskriptif.

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Menurut Patton (dalam Moleong, 2012) triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi dan Karakteristik Informan

Desa Karangraou dan Desa Bajaranyar merupakan desa dalam wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Data Desa

tahun 2017 menyebutkan bahwa penduduk Desa Karangraou berjumlah 4.265 jiwa yang terdiri atas 2.160 laki-laki dan 2.105 perempuan. Adapun luas wilayahnya 189,76 hektar yang terdiri dari swawah 45,5 hektar, tanah pekarangan 67,45 hektar tanah tegalan atau perkebunan rakyat 67,89 serta peruntukan lainnya seluas 8,92 hektar. Desa Karangraou memiliki 5 Kadus, karena letaknya berdekatan dengan perkotaan maka desa ini berkembang menjadi daerah pemukiman. Karakteristik informan pada penelitian ini terdiri atas Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Ketua RW dan salah seorang tokoh masyarakat desa. Pemilihan tersebut dilakukan secara *snowball sampling* dengan pertimbangan mereka mengetahui betul proses kolaborasi dalam program dana desa. Terhadap para informan tersebut kemudian dilakukan wawancara mendalam dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah.

Anggaran dan Belanja yang berasal dari Dana Desa

Berdasarkan data sekunder dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Karangraou dalam tulisan ini disusun dengan memilahkan dana yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa dengan dana yang berasal dari pihak lain. Anggaran dan belanja Pemerintah Desa Karangraou yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa tersusun sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Karangrau yang berfokus pada dana Desa Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah Anggaran		
		Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
I	Jenis Pendapatan			
	Dana Desa (DD)	Rp. 788.720.000		
II	Jenis Belanja			
	A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp 578.147.900 (73,30%)	Rp 12.852.425 (1,69%)
	B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 197.719.657 (25,01%)	
	C. Penyertaan Modal			
	Jumlah Belanja	-	Rp 755.867.575	Rp 12.852.425
	Jumlah Pendapatan	Rp 788.720.000	-	

Sumber: Data Sekunder diolah

Selanjutnya anggaran dan belanja Pemerintah Desa Banjaranyar yang berasal dari dana desa dan

alokasi dana desa tersusun sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Banjaranyar yang berfokus pada dana Desa Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah Anggaran		
		Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
I	Jenis Pendapatan			
	Dana Desa (DD)	Rp. 850.882.000		
II	Jenis Belanja			
	A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp514.365.250 (60,45%)	Rp. 5.230.000 (0,61%)
	B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 326.616.750 (38,39%)	Rp. 21.410.450 (2,516%)
	C. Penyertaan Modal		Rp. 19.910.000 (2,39%)	
	Jumlah Belanja	-	Rp 824.241.000	Rp 26.640.450
	Jumlah Pendapatan	Rp 850.882.000	-	

Sumber : Data Sekunder Diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih difokuskan pada pembangunan fisik bukan pada bidang pemberdayaan,

sementara amanat undang memberikan penekanan pada bidang pemberdayaan masyarakat.

1. Proses Kolaborasi dalam Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam proses kolaborasi dapat dianalisis berdasarkan hubungan antar variabel sebagaimana yang diamanatkan dalam model kolaboratif. Dalam penjelasan ini dikemukakan hubungan

antar variabel tersebut yaitu hubungan antara kondisi awal dengan proses kolaborasi dan proses kolaborasi dengan hasil guna dalam kolaborasi.

Tabel 3. Hubungan antara Kondisi Awal Program dengan Proses Kolaborasi

No	Kondisi Awal	Proses Kolaborasi			
		Dialog Tatap muka	Membangun Kepercayaan	Komitmen	Berbagi Pengetahuan
1	Sumber Pengetahuan	Kecukupan informasi dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran dapat memperlancar dialog tatap muka	Pemahaman terhadap semua peraturan yang mendasari dan wawasan yang luas diperlukan untuk membangun kepercayaan	Komitmen dibentuk atas dasar keyakinan orang bahwa para pemangku kebijakan di desa memiliki informasi yang luas	Pemilik pengetahuan memberikan gambaran-gambaran kelebihan dan kekurangan agar pihak lain tidak merasa benar sendiri
2	Usaha Mengatasi Konflik	Untuk mengatasi konflik yang terjadi telah disediakan ruang berdialog yang disebut Musyawarah Desa (Musdes)	Kepercayaan harus dibangun terus-menerus untuk menutup ruang untuk konflik	Proses berakhirnya konflik karena masyarakat dan stakeholder mengembangkan komitmen	Praktek baik dan buruk adanya konflik telah dielaborasi agar menasyarakat mengerti akibat yang terjadi

Sumber: Hasil wawancara dan diolah

2. Hubungan antara proses kolaborasi dengan *outcomes* (hasil guna) dalam kolaborasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan proses kolaborasi memberikan manfaat bagi dampak pembangunan fisik dan non fisik.

Dengan dibukanya dialog antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan, hal ini menciptakan kepuasan masyarakat untuk menerima pilihan atau keputusan tentang alokasi dana desa.

Dialog juga mendorong pembangunan kepercayaan (*trust-building*). Dengan dialog, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kepentingan masing-masing. Hal ini mendorong terjadinya proses kesadaran pentingnya untuk melakukan efisiensi penggunaan dana desa. Artinya, dana desa yang terbatas betul betul dimanfaatkan untuk

membayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, kecurigaan masyarakat pun semakin berkurang. Pemerintah desa menjadi lebih terbuka dengan masukan masyarakat. Dan bahkan alokasi dana desa betul-betul memperhatikan aspek pemerataan sehingga berbagai program dan kegiatan dapat dinikmati oleh masyarakat desa.

Pembangunan desa berkelanjutan menuntut proses kolaborasi yang melibatkan partisipasi *stakeholder*. Dengan menggunakan model tata kelola kolaborasi dari Ansell dan Gash (2007), penelitian ini menemukan bahwa pembangunan desa yang difasilitasi dana desa telah mendorong proses kolaboratif. Pemerintah desa bersama stakeholder terlibat dalam proses

perencanaan hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa.

Kolaborasi berarti juga pemberdayaan. Pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat juga telah mendorong pembentukan komitmen dan kepercayaan publik. Proses perencanaan pembangunan menjadi semakin transparan dan akuntabel. Temuan penelitian ini mendukung studi yang telah dilakukan oleh Wardani dan Utami (2020) yang menemukan adanya korelasi antara pemberdayaan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Kolaborasi dalam pembangunan desa juga terbukti

dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena masyarakat terlibat dalam proses perencanaan. Dengan keterlibatan dalam perencanaan maka masyarakat ikut memonitor dan mengevaluasi implementasi program. Hal ini berdampak terhadap efektivitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Studi ini mendukung studi yang dilakukan oleh Zeho et al. (2020) yang menyoroti pentingnya kolaborasi stakeholder dalam proses pembangunan desa.

Tabel 4. Hubungan antara Proses Kolaborasi dengan Hasil Guna terhadap Masyarakat

No	Proses Kolaborasi	Outcome (Hasil Guna) Dana Desa	
		Hasil Sementara	Manfaat Program
1	Dialog Tatapmuka	Pekerjaan fisik dan non fisik terselesaikandengan tepat waktu	Kepuasan dalam menerima keputusan karena harapan masyarakat terpenuhi
2	Membangun Kepercayaan	Adanya kesadaran masyarakat bahwa penggunaandana desa efisien dan percayaakankemampuanpara <i>stakeholders</i>	Rasa curiga dan iri hati berkurang karena pembangunan dilaksanakan secara merata
3	Komitmen	Partisipasi masyarakatmeningkat	Pola pemeliharaan bersama terhadap hasil-hasil pembangunan
4	Berbagi Pengetahuan	Pengetahuanmasyarakat dan para pemangku kepentingansemakin pandai dalam pengelolaandana desa	Mayarakat telah berfikir untuk senantiasa meningkatkan kualitas program mulai dari kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan proyek

KESIMPULAN

Dari uraian yang cukup luas mengenai hasil penelitian tentang model kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangrau Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Proses kolaborasi yang telah berjalan dilihat dari adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berdimensi pada kebutuhan masyarakat. Hasil program dirasakan oleh masyarakatnya dalam bentuk berkembangnya infrastruktur fisik desa dan usaha pemberdayaan masyarakat.
2. Kepemimpinan kepala desa dan aparatur desa masih menjadi faktor penting dalam menentukan agenda kebijakan desa dan pola keterlibatan masyarakat.

PENGHARGAAN

Penelitian ini didanai dengan sumber dana BLU Universitas Jenderal Soedirman pada 2019.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571. doi:10.1093/jopart/mum032
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 22, Issue 1, 1-

29, <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Wardani, D., & Utami, R. R. (2020). Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa sidoharjo. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 35 - 50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.36>.
- Zeho, F., Prabowo, A., Estiningtyas, R., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 12-22. doi:<http://dx.doi.org/10.31328/jed.v3i2.1395>